

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara sebagai elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan kualitas informasi laporan keuangan publik. Kualitas informasi laporan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Pelaporan keuangan (*financial reporting*) meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. (Intan *et al.*, 2023).

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Tanjung 2012:12). Selain itu harus disadari pula bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Informasi akan bermanfaat bila informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi, dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai, dan informasinya dapat dipercaya (Suwardjono, 2005). Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi.

Laporan keuangan daerah yang berkualitas akan dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam akuntansi pemerintahan, bahkan organisasional tentang pemerintahan daerah (Dewi dan Yusnarwati, 2015). Kegagalan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi

akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*. (Mirnawati et al., 2021)

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh setiap individu. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan kepribadian karakteristik yang secara langsung mempengaruhi kinerja pegawai (Wibowo, 2014). Kompetensi sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilainya, ketrampilan pengalaman, karakteristik, motivasi, masalah emosional, kemampuan intelektual dan budaya organisasi (Michael Zwell, 2000).

Kualitas sumber daya manusia di BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat dari latar belakang pendidikan formal. Faktor yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan yaitu jenjang pendidikan, pengelolaan keuangan yang baik didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, meliputi jenjang pendidikan, mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengenai keuangan, serta mengikuti pelatihan (Windiastuti, 2013). Selain itu, pengetahuan akuntansi juga penting dalam penyusunan laporan keuangan, tingkat pengetahuan akuntansi yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Jumlah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 115 orang. Berikut data jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut latar belakang pendidikan pegawai di Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tercantum dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Di BPKAD
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	LK	PR	Jumlah
1	S-2	2	0	2
2	S-1	10	15	25
3	D-IV	0	0	0
4	D-III	2	3	5
5	SMA	6	7	13
	Total			45

Sumber : BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 45 pegawai. Dengan jumlah pegawai yang terbatas akan berakibat pada kualitas sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola dan menyusun laporan keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pelaporan keuangan pemerintah daerah karena dapat mengurangi kualitas, ketepatan waktu, dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan.

Dengan berkembangnya Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Menurut Darmawan (2012), secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut merupakan

teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang Tahun ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektifitas dengan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kriteria kualitas informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan.

Pada umumnya pengawasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk menjaga kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Kegiatan organisasi akan kurang berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan apabila tanpa adanya pengawasan, dengan pengawasan akan di ketahui kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan menejemen sejak awal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum sepenuhnya memahami tugas dan

fungsinya, masih rendahnya sistem pengawasan yang di terapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti pemeriksaan audit eksternal di lakukan setahun sekali.

Dalam hal ini, tidak terkecuali kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat diandalkan dan tepat waktu. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari salah satu instansi BPKAD masih belum sepenuhnya berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga belum sepenuhnya mampu menyusun laporan keuangan. Begitu pula pegawai yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan, masih banyak yang belum memahami sepenuhnya akan tugas dan tanggungjawab, sistem akuntansi dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1. 2
Data Kepegawaian Bagian BPKAD
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024

Data Kepegawaian Bagian Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan				
No	Item	Jumlah	%	Total
1	Akuntansi	3	5,55	54
2	Ekonomi	9	16,66	54
3	Non Ekonomi	42	77,77	54
Total				100%

Sumber: Diolah Peneliti 2024

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebesar 5,55%, berlatar belakang pendidikan ekonomi sebesar 16,66%, dan pendidikan non ekonomi sebesar 77,77%. Hal inilah yang menyebabkan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di BPKAD

Kabupaten Timor Tengah Selatan belum maksimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Apakah Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan?
3. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari Teknologi Informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari Pengawasan Keuangan Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kajian literature mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengawasan diharapkan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Bagi Kantor BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi/saran untuk memperbaiki Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai dasar dan rujukan teori penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.